

Analysis of the Effectiveness of Social Assistance Program Budget Management in the Sidoarjo District Area at the District Social Service

[Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Program Bantuan Sosial di Wilayah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo]

Elsa Ismiatus Sholika¹⁾, Sarwenda Biduri^{*,2)}

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: sarwendabiduri@umsida.ac.id

Abstract. *Poverty is a challenge facing developing nations like Indonesia. The government attempts to address this through social assistance programs—such as the Family Hope Program (PKH), Non-Cash Food Assistance (BPNT), and Direct Cash Assistance (BLT)—managed by the Ministry of Social Affairs, with budgets increasing annually. However, concerns exist regarding the management of these funds. This study employs a qualitative method to analyze the efficiency of budget management at the Sidoarjo Regency Social Agency. The findings indicate that while budget management adheres to established procedures, its effectiveness remains suboptimal due to inaccuracies in the Integrated Social Welfare Data (DTKS). This results in aid failing to reach the intended recipients and leads to unused funds. To enhance effectiveness, it is necessary to strengthen data verification at the local level and improve alignment with the central government.*

Keywords - author guidelines; Effectiveness, Budget Management, Social Assistance, Social Services, Sidoarjo.

Abstrak. *Kemiskinan adalah masalah yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah mencoba mengatasinya dengan program bantuan sosial yang anggarannya meningkat setiap tahun, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Langsung Tunai yang dikelola oleh Kemensos. Namun, ada keraguan tentang pengelolaan anggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi pengelolaan anggaran di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah sesuai prosedur, tetapi efektivitasnya masih kurang karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang tidak akurat. Ini menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran dan dana yang tidak terpakai. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu penguatan verifikasi data di tingkat lokal dan penyesuaian dengan pemerintah pusat.*

Kata Kunci - petunjuk penulis; Efektivitas, Pengelolaan Anggaran, Bantuan Sosial, Dinas Sosial, Sidoarjo.

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah yang telah lama dihadapi oleh hampir semua negara berkembang, terutama negara dengan populasi padat seperti Indonesia. Kemiskinan seharusnya menjadi masalah bersama yang harus ditangani dengan serius. Kemiskinan bukan hanya masalah individu, golongan, atau pemerintah, tetapi masalah setiap warga negara [1]. Masalah kemiskinan adalah masalah kompleks dan multi-dimensi yang menjadi prioritas pembangunan. Sejak lama, pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai inisiatif untuk mengatasi masalah kemiskinan[2].

Isu kemiskinan tidak bisa dipisahkan dari faktor struktural dan kultural yang ada di masyarakat. Faktor struktural meliputi terbatasnya peluang kerja, ketidakmerataan pembangunan di berbagai daerah, serta kurangnya akses pendidikan dan layanan kesehatan. Di sisi lain, faktor kultural sering kali berkaitan dengan cara pandang masyarakat, budaya konsumtif, dan minimnya kesadaran akan pentingnya pengembangan keterampilan [3]. Apabila salah satu tahapan ini tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas program dapat terganggu. Misalnya, perencanaan yang tidak matang akan menyebabkan data penerima bantuan tidak akurat, sementara lemahnya pengawasan bisa membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari keberhasilan program dalam memberikan manfaat nyata kepada penerima bantuan[4].

Ada program Transfer Manfaat Langsung yang memungkinkan tunjangan dan bantuan sosial

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

langsung dikirim ke rekening bank para penerima bantuan sosial[5]. Keuntungan dari program ini adalah mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dan kebocoran anggaran. Namun, hambatannya adalah masih ada beberapa masyarakat yang belum memiliki rekening bank, sehingga akses terhadap bantuan menjadi terbatas [6]. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa isu pengelolaan bantuan sosial bukan sekadar masalah lokal, tetapi merupakan fenomena global yang membutuhkan kebijakan inovatif yang berkelanjutan. Anggaran bansos di Indonesia pada tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Anggaran bansos selama periode tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 1. Anggaran Bansos di Indonesia Tahun 2022-2024

Tahun 2022	Rp. 476,3 triliun
Tahun 2023	Rp. 476,3 triliun
Tahun 2024	Rp. 496,8 triliun

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas kenaikan anggaran dari tahun 2022 hingga tahun 2024 mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Meskipun alokasi dana semakin besar, seringkali efektivitas distribusi bantuan sosial dipertanyakan. Banyak laporan menunjukkan bahwa data penerima bansos tidak selalu akurat, sehingga bantuan tidak tepat sasaran.

Jumlah anggaran biaya untuk bantuan sosial mengalami kenaikan yang relevan antara tahun 2022 dan sekarang. Di tahun 2022, total biaya anggaran untuk perlindungan sosial mencapai Rp. 406,6 triliun, guna untuk berbagai program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Memasuki tahun 2023, jumlah biaya anggaran ini mengalami kenaikan menjadi Rp. 476 triliun. Sementara itu, untuk tahun 2024, pemerintah menguraikan hampir Rp. 500 triliun, tepatnya Rp. 496 triliun, yang menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 20 triliun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Terdapat uraian belanja bantuan sosial di tahun 2022 hingga 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. Data anggaran Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 - 2024

Uraian	Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
Belanja Bantuan Sosial	2022	Rp. 97.928.061.416.000	Rp. 96.534.397.587.261	Rp. 1.393.663.828.739	1,44%
	2023	Rp. 87.275.374.140.000	Rp. 85.530.010.687.985	Rp. 1.745.363.452.015	2,04%

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2022 realisasinya kurang dari anggarannya dengan persentase sebesar 1,44% , sedangkan pada tahun 2023 realisasinya juga kurang namun dengan persentase yang lebih tinggi sebesar 2,04%. Kombinasi antara area industri, perkotaan, dan pedesaan menimbulkan kompleksitas dalam penyaluran bantuan sosial. Selain itu, jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi dibanding daerah lain di Jawa Timur menjadikan efektivitas pengelolaan bansos di wilayah ini penting untuk diteliti.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Bansos Kabupaten Sidoarjo

Rincian Anggaran Bansos Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024	Total Anggaran Bansos	Realisasi	Persentase
	Rp. 97.131.720.000	Rp. 360.000.000	0,37%

Sumber: djp.kemenkeu.id

Realisasi anggaran bansos di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun anggaran 2024, total anggaran mencapai Rp. 96,13 miliar, namun realisasinya baru mencapai Rp. 360 juta. Meskipun anggaran sudah disiapkan, tetapi realisasinya masih rendah, menyiratkan pentingnya perhatian lebih agar bantuan dapat sampai kepada masyarakat yang memerlukannya.

Tabel 4. Alokasi Anggaran Bansos Kabupaten Sidoarjo

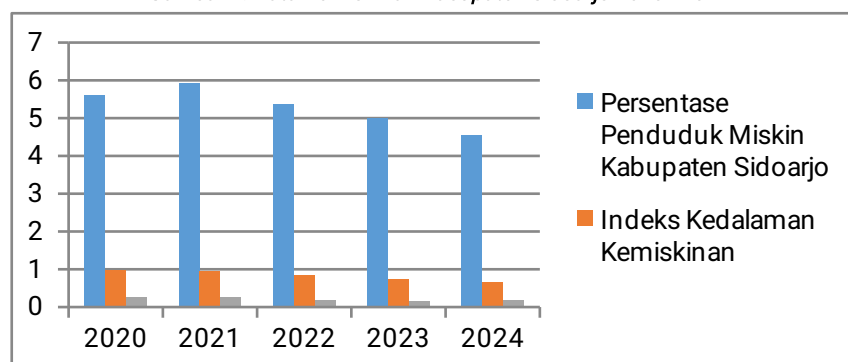
Nama Program	Sasaran/Target Alokasi	Skema dan Bentuk Bantuan	Estimasi Alokasi
Program Keluarga Harapan (PKH)	>14.000 Keluarga Penerima Manfaat	Bantuan tunai berdasarkan komponen (Pendidikan Anak	(Disesuaikan dengan jumlah komponen tiap

	(KPM)	SD/SMP/SMA, Kesehatan Ibu Hamil/Balita, Kesejahteraan Lansia/Disabilitas)	keluarga penerima)
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Keluarga miskin/kurang mampu yang terdaftar aktif dalam DTKS	Saldo elektronik non-tunai yang disalurkan ke e-warung untuk dibelanjakan kebutuhan pangan pokok (seperti beras dan telur)	(Berupa kuota dana pangan perbulan per-KPM)
Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Keluarga yang kurang mampu terdampak inflasi/ekonomi yang memengaruhi standar kriteria	Bantuan tunai langsung senilai: - Rp. 600.000/bulan (diberikan per 3 bulan) - Rp. 300.000/bulan (untuk 3 bulan berikutnya)	(Dialokasikan berdasarkan kuota jaring pengaman sosial darurat)
TOTAL ANGGARAN BANSOS	Kabupaten Sidoarjo	Program Kemensos & Pemerintah Daerah	Rp. 96.131.720.000

Sumber: djpk.kemenkeu.id

Salah satu tujuan utama pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yakni melalui program bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diselenggarakan oleh Kemensos [7]. Program bantuan sosial ini bertujuan membantu keluarga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka untuk meningkatkan kapasitas dan keluar dari kemiskinan [8].

Gambar 1. Data Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo 2020 - 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan informasi dari BPS, jumlah warga kurang mampu di Kabupaten Sidoarjo mencapai 109,39 ribu jiwa, berkurang sebesar 9,76 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi bulan Maret 2023 yang sebesar 119,15 ribu jiwa. Tingkatan warga kurang mampu di Kabupaten Sidoarjo menurun yang awalnya 5,59% menjadi 4,53%. Begitupun dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan yang juga menurun setiap tahun kedepannya (BPS, 2024).

Di wilayah Kabupaten Sidoarjo terdapat 184.305 orang yang termasuk dalam kategori orang tidak mampu yang menerima perlindungan dan jaminan sosial. Pemerintah menawarkan berbagai program bansos melalui Dinas Sosial, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Langsung Tunai, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat [9]. Pemberitahuan untuk mendapatkan bansos dapat diakses melalui aplikasi SIPRAJA [10]. Di dalam aplikasi SIPRAJA ini, mendukung untuk proses verifikasi dan pengiriman bantuan sosial kepada penerima yang telah memenuhi syarat atau kriteria [3].

Berdasarkan informasi yang tersedia, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial pangan di Kabupaten Sidoarjo adalah 14.690 keluarga. Oleh karena itu, angka 14.690 keluarga tidak sepenuhnya sesuai dengan informasi yang tersedia. Angka yang lebih realistis adalah sekitar 92.127 orang, meski perlu catatan bahwa distribusi ini mungkin tidak spesifik untuk satu kabupaten tanpa melihat keseluruhan provinsi Jawa Timur.

Jumlah orang yang menerima bantuan pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo adalah 720 orang. Data ini menggambarkan usaha pemerintah lokal dalam membantu pelaku usaha kecil dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit, terutama karena pengaruh pandemi Covid-19. Keberhasilan program bantuan sosial dalam mendukung masyarakat dapat dinilai dari seberapa efektif program tersebut dilaksanakan. Evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai. Kegiatan program harus tepat agar tujuan tercapai, jika tidak, bantuan tidak efektif [11].

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan yang tepat dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu. Untuk para pemimpin, penting untuk menemukan metode yang tepat dan berkonsentrasi pada pekerjaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, efektivitas adalah pengukuran tingkat pencapaian sasaran atau tujuan (baik dalam kuantitas, kualitas, maupun waktu) [12]. Efektivitas juga diartikan konsep yang mencakup faktor internal dan eksternal yang berpengaruh. Oleh karena itu, efektivitas tidak hanya terlihat dari tingkat produktivitas, tapi juga dari pandangan dan sikap pribadi. Efektivitas tercapai dengan memanfaatkan sumber daya organisasi secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan melalui evaluasi input, proses, dan output [13].

Efektivitas pengelolaan anggaran diartikan sebagai pencapaian target finansial yang telah ditetapkan, yang mencerminkan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal [14]. Pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dapat dijamin melalui berbagai fase, diawali dengan pembuatan rencana kerja yang dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, diikuti dengan pengawasan pelaksanaan, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintahan, dan diakhiri dengan penyusunan anggaran selama satu tahun. Disamping itu, pengelolaan anggaran yang efektif juga berpengaruh besar terhadap akuntabilitas pemerintah berkaitan dengan pelayanan publik kepada masyarakat [15].

Dalam penelitian ini grand teori yang digunakan adalah teori dari Stewardship Theory (Teori Pelayanan) dan New Public Management (NPM). Kedua teori tersebut memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis efektivitas pengelolaan penganggaran bantuan sosial. Stewardship Theory adalah teori yang berfokus pada pelayanan publik dan memiliki tujuan yang lebih tinggi seperti melayani masyarakat khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu dan rentan. Teori ini memberikan kerangka berpikir bahwa aparat di Dinas Sosial memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk mengelola anggaran swcara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial harus mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran untuk memastikan program bantuan sosial untuk mencapai tujuannya. Teori ini menjelaskan mengapa efektivitas itu penting. Bukan hanya angka dan target, tetapi juga cerminan dari keberhasilan Dinas Sosial dalam menjalankan amanah sebagai pelayan publik [16].

New Public Management adalah teori dalam administrasi publik yang menerapkan model manajemen dari sektor swasta ke dalam sektor publik. Fokus utama dalam teori ini adalah pada efektivitas dan pengukuran kinerja untuk mencapai hasil yang lebih baik. Inti dari teori ini adalah menjawab atas seberapa efektif pengelolaan anggaran pada dinas sosial, karena seluruh paradigma dari teori ini dibangun di atas pengukuran kinerja dan efektivitas. NPM menyediakan alat untuk menganalisis tahapan pengelolaan anggaran seperti tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta pelaporan [17]. Teori NPM mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada proses, tetapi juga pada hasil akhir, yaitu apakah bantuan sosial tersebut benar-benar efektif mengurangi angka kemiskinan di Sidoarjo.

Di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program bantuan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Program-program bantuan sosial tersebut diantaranya; 1) **Program Keluarga Harapan (PKH)** memberikan bantuan tunai diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan syarat bahwa mereka harus memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk pendidikan dan kesehatan [18].

2) **Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)** adalah program pemerintah untuk mendukung warga miskin di Indonesia, yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH), memiliki tujuan utama dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi yang seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Penyaluran bantuan sosial non tunai diatur dalam PERPRESRI No.63 Tahun 2017 [19].

3) **Bantuan Langsung Tunai (BLT)** adalah program pemerintah yang menggantikan tunjangan BBM dan ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya BLT, diharapkan pembagian kekayaan di masyarakat menjadi lebih merata. Pembagian BLT sebesar Rp.600.000 per bulan untuk setiap keluarga kurang mampu yang memenuhi standar dan diberikan per 3 (tiga) bulan dan Rp. 300.000 lagi bulan untuk tiga bulan berikutnya [20].

Terdapat beberapa penelitian terdahulu membahas terkait *Efektivitas Program Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*. Kajian yang diteliti oleh [8] menyajikan hasil terkait efektivitas program bantuan sosial bagi keluarga miskin, perlu dilakukan analisis mendalam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program ini masih suboptimal. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengintegrasikan program secara lintas sektor serta pengembangan kapasitas untuk mengalokasikan bantuan dapat disalurkan dengan lebih cepat guna dan lebih baik.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu membahas terkait *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial*. Kajian yang diteliti oleh [11] menyajikan hasil perlu adanya efektivitas pelaksanaan bantuan dalam suatu program dapat diukur melalui sejauh mana peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari pemberian program bantuan sosial.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu membahas terkait *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non-Tunai*. Kajian yang diteliti oleh [21] menyajikan hasil bahwa program bantuan sosial ini sudah cukup efektif, tetapi ada faktor penghambat yang ada pada program ini yaitu kurangnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan dan sosialisasi masih kurang jelas.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus utama penelitian ini adalah mengukur tingkat keefektifan program-program bantuan sosial terhadap pengelolaan anggaran di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini patut dilaksanakan karena tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana efektivitas pengelolaan anggaran bantuan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo? (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan sosial di Kabupaten Sidoarjo? (3) Dengan cara apa agar bisa diterapkan guna memperbaiki efektivitas pengelolaan anggaran untuk bansos?. Dengan rumusan masalah tersebut, diharapkan penelitian ini bisa memberikan pemahaman yang utuh mengenai pengelolaan anggaran bantuan sosial, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: (1) Menganalisis seberapa efektif pengelolaan anggaran bansos yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo (2) Mengidentifikasi rintangan atau hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan program bansos, dan (3) Menyusun solusi untuk strategi peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran bansos agar lebih tepat sasaran. Selain itu, manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai akuntansi sektor publik, khususnya pada topik efektivitas pengelolaan anggaran bansos. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bansos, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan di daerah [22].

II. METODE

Lokasi penelitian difokuskan pada tempat di mana penelitian akan dilakukan guna mengumpulkan data atau informasi terkait permasalahan yang akan diteliti [23]. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Metode ini berfokus pada penggunaan narasi dan kata-kata untuk menggambarkan serta menjelaskan makna di balik setiap fenomena, gejala, atau situasi sosial tertentu. Penelitian kualitatif memberikan peneliti alat yang penting untuk memahami dan menginterpretasi makna dari fenomena, gejala, dan situasi sosial yang dialami oleh individu [24].

Penelitian ini juga menerapkan pendekatan deskripsi kualitatif [25]. Deskripsi kualitatif yang berfungsi untuk menggambarkan suatu fenomena secara deskriptif. Deskripsi kualitatif bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait siapa, apa, di mana, dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi. Analisis dilakukan secara mendalam guna mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari peristiwa tersebut [26]. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Selain wawancara, observasi juga menjadi instrumen penting dalam penelitian ini. Observasi dilakukan di beberapa desa penerima bansos untuk melihat secara langsung proses pencairan bantuan di e-warung, serta interaksi masyarakat dengan pendamping sosial. Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer dalam penelitian ini [27]. Metode ini terletak pada kemampuannya menggali fenomena secara mendalam, meskipun kelemahannya adalah tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Namun, karena fokus penelitian adalah efektivitas di Kabupaten Sidoarjo, maka pendekatan kualitatif deskriptif dianggap paling sesuai.

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer untuk membandingkan data anggaran yang dibutuhkan Dinas Sosial dalam melaksanakan program bansos. Data primer adalah data

yang diperoleh dari sumber penelitiannya secara langsung, wawancara dilakukan kepada informan bagian Kepala Dinas dan pengelolaan anggaran bantuan sosial, sedangkan data sekunder adalah informasi melalui jurnal, web, buku, dan sumber data lainnya. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi [28]. Metode untuk menganalisis data meliputi proses mengumpulkan data, menyajikan data, dan menyusun kesimpulan [21]. Teknik uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data untuk meneliti kepastian dan kebenaran datanya [29].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan data dan informasi yang dilakukan melalui observasi dan wawancara, peneliti berhasil memperoleh hasil penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Program Bantuan Sosial Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo Pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo”. Berikut data kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang menerima program bantuan sosial disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel1. Data Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Penerima Program Bansos

No.	Kecamatan	Jumlah desa	Jumlah penerima
1.	Balongbendo	20	142 orang
2.	Buduran	15	115 orang
3.	Candi	24	107 orang
4.	Gedangan	15	62 orang
5.	Jabon	13	66 orang
6.	Krembung	19	110 orang
7.	Krian	19	130 orang
8.	Porong	12	70 orang
9.	Prambon	20	139 orang
10.	Sedati	16	89 orang
11.	Sidoarjo	10	69 orang
12.	Sukodono	19	30 orang
13.	Taman	16	120 orang
14.	Tanggulangun	18	140 orang
15.	Tarik	20	215 orang
16.	Tulangan	22	210 orang
17.	Waru	17	50 orang
18.	Wonoayu	23	133 orang
Jumlah		318	1.997

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo (2025)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa ada 18 kecamatan dan 318 desa dengan penerima bansos sejumlah 1.997 orang pada tahun 2025. Pemerintah melaksanakan kewajibannya dengan baik, seperti pemberian program bansos sudah merujuk kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan, yakni warga yang kurang mampu dan tidak berpenghasilan. Pemerintah ikut andil saat proses pelaksanaan program bansos dengan mengawasi program ini agar bantuan yang diberikan dapat tersalurkan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya sehingga meminimalisir ketidaksesuaian dalam pemilihan penerima bantuan sosial.

Indikator pemahaman mengenai program bantuan sosial digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif pemahaman masyarakat tentang program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, khususnya kepada masyarakat KPM. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kabupaten Sidoarjo.

"Pelaksanaan bantuan sosial di Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan sangat baik dan sudah tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Kami juga terus melakukan pemantauan terkait pelaksanaan program ini, untuk memastikan bahwa bantuan dapat disalurkan dengan benar kepada masyarakat yang seharusnya menerima, mengingat potensi kesalahan dalam pemilihan penerima bantuan." (Hasil wawancara pada 29-10-2025).

Hasil wawancara peneliti dengan narasumber mengenai pemahaman program bantuan sosial di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa selama program bantuan sosial ini dilaksanakan, pelaksanaannya sudah cukup baik dan telah mengarah kepada masyarakat yang memang berhak menerima bantuan tersebut. Selain itu, petugas yang menangani program bantuan sosial juga aktif melakukan pengawasan serta monitoring untuk memastikan tidak terjadi kekeliruan dalam proses pemilihan penerima bantuan sosial.

Dari aspek ketepatan sasaran, Pemerintah berusaha meyakinkan bahwa bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan melalui metode pembaruan data penerima bansos. Proses pembaruan ini dilakukan dengan mengacu pada data lama yang telah tersedia serta tambahan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Nama penerima bansos yang baru dapat timbul secara tiba-tiba tanpa melalui proses penyampaian dari pihak kecamatan atau desa, karena data tersebut diperbarui atau ditetapkan langsung oleh BPS sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan.

Tanda ukur untuk bantuan sosial ditujukan kepada individu yang kurang mampu, yang masih memiliki tanggungan untuk pendidikan anak-anak mereka, dan kita juga memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat tersebut untuk menjaga kesehatan mereka. Selain itu, orang-orang yang tidak mendapatkan pendapatan dan yang sudah berusia lanjut juga berhak menerima bantuan sosial. Mengenai data, itu berasal dari data sebelumnya dan juga terdapat penambahan dari BPS, di mana ada nama-nama yang tiba-tiba muncul sebagai penerima tanpa adanya pengajuan dari kita. (Hasil wawancara 29-10-2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa ketepatan sasaran sudah terlaksana dengan baik karena warga yang berhak menerima bantuan sosial adalah warga yang memang kurang mampu yang merupakan lansia dan orang tidak berpenghasilan. Selain itu metode pembaruan data mencakup verifikasi perubahan status penerima bansos. Jika seorang penerima bansos meninggal dunia, maka statusnya akan dihentikan, dan pemerintah desa dapat mengajukan penggantinya, terutama jika dalam rumah tangga tersebut masih ada anggota keluarga yang membutuhkan. Ahli waris dari penerima bantuan yang telah meninggal dunia juga dapat diusulkan sebagai penerima baru, namun harus melalui beberapa proses verifikasi terlebih dahulu.

"Kadang ada penerima bantuan yang putus di tahun itu karena perubahan status itu tidak bisa berubah, misal ada penerima yang meninggal dunia baru bisa verifikasi data kemudian bisa nambah penerima yang diajukan sebagai pengganti warga yang meninggal dunia untuk diteruskan menerima bantuan sosial." (Hasil wawancara 29-10-2025).

Selain itu, adapun masyarakat yang mengeluh tentang adanya bantuan sosial yang merupakan warga dikatakan masih mampu tetapi tetap menerima bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa proses verifikasi data penerima manfaat atau bansos masih menjadi titik lemah utama dalam pengelolaan bansos. Meskipun dinyatakan ketepatan sasaran sudah cukup baik, tetapi hal seperti itu masih ada banyak di kalangan masyarakat. Hal itu tidak hanya menimbulkan masalah manajerial, tetapi juga berdampak pada keseimbangan sosial di masyarakat karena memicu rasa kebencian dan rasa ketidakpuasan terhadap program bantuan sosial.

"Tetangga saya lebih mampu daripada saya, tapi justru dapat bantuan. Sedangkan saya baru menerima setelah mengajukan berkali-kali. Saya sudah mengajukan minta di daftarkan ke pak RT, tetapi sampai saat ini juga belum dapat. Saya berharap sekali karena saya kerjanya buruh dan gajinya tidak seberapa, untuk makan saja susah dan anak-anak saya masih sekolah. Saya merasa iri sama tetangga saya yang hidupnya mewah tetapi mendapat bantuan sembako dan uang. Saya harap pemerintah

menyurvei kehidupan warga yang benar-benar membutuhkan bukan hanya dari selembar kertas. Bantuan ini sangat membantu, tapi kadang tidak jelas kapan cairnya, sehingga kami sulit mengatur kebutuhan sehari-hari "

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa terdapat berbagai pandangan masyarakat mengenai manfaat bansos. Pernyataan ini menegaskan pentingnya konsistensi distribusi sebagai faktor kepercayaan publik. Dari sisi data statistik, dokumen APBD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa realisasi anggaran bansos dalam kurun waktu 2020–2023 cenderung stagnan, bahkan mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi. Misalnya pada tahun 2021, realisasi hanya mencapai sekitar 82% dari total anggaran, sementara pada 2023 turun hingga 78%. Angka ini mengindikasikan adanya permasalahan sistemik dalam pengelolaan, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan.

Selain itu, temuan lapangan menyatakan bahwa penerapan aplikasi SIPRAJA sebagai pembaruan digital masih menghadapi beberapa hambatan. Beberapa desa yang jauh dari pusat kota mengalami kesulitan jaringan internet, sehingga proses pemeriksaan data penerima manfaat menjadi terhambat. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya soal aplikasi, tetapi juga kesiapan sarana dan pengetahuan digital masyarakat. Data lain menunjukkan bahwa program PKH memang memberikan dampak positif terhadap kepatuhan keluarga dalam hal pendidikan dan kesehatan. Anak-anak dari keluarga penerima PKH lebih rutin bersekolah dan mengakses layanan kesehatan. Namun, dampak ini baru terlihat di sebagian kecil penerima manfaat, sedangkan dalam skala makro pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan masih terbatas.

• **Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo**

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi utama dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial. Program bantuan sosial menjadi salah satu program prioritas yang dilaksanakan setiap tahun, dengan tujuan utama menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Pada tahun anggaran 2024, Dinas Sosial memperoleh alokasi anggaran bantuan sosial sebesar Rp. 96,13 miliar. Namun, realisasi penyaluran hingga pertengahan tahun baru mencapai Rp. 360 juta atau sekitar 0,37%. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara perencanaan dan implementasi anggaran. Indikator kemiskinan selalu menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Berbagai kebijakan pun telah diupayakan dalam hal mengentaskan masalah kemiskinan di Jawa Timur, terutama di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Saat ini pemerintah memiliki target untuk mengentaskan kemiskinan dimulai dari cakupan paling bawah, yakni kemiskinan ekstrem .

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran, antara lain:

1. Proses verifikasi data penerima manfaat masih berlangsung lama akibat keterbatasan SDM.
2. Pemanfaatan aplikasi SIPRAJA belum optimal karena sebagian masyarakat kesulitan mengakses teknologi digital.
3. Koordinasi lintas instansi (misalnya dengan perangkat desa dan kecamatan) masih belum sinkron, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam distribusi.

Beberapa penerima manfaat juga menunjukkan bahwa sebagian bantuan belum diterima secara rutin. Ada yang mengaku hanya mendapatkan bantuan pada awal tahun, sementara bulan-bulan berikutnya tidak ada informasi lebih lanjut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap program bansos. Dari dokumen realisasi APBD Kabupaten Sidoarjo, terlihat bahwa anggaran bansos pada 2022–2023 mengalami penurunan serapan dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan. Pola ini konsisten dengan data BPS yang menunjukkan meskipun angka kemiskinan menurun, efektivitas penggunaan dana masih belum optimal.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2024 mencapai lebih dari 14.000 keluarga. Sebagian besar penerima berada di wilayah pedesaan dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Dari hasil observasi, mayoritas KPM bekerja di sektor informal, seperti buruh harian, pedagang kecil, dan pekerja serabutan. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran program bantuan sosial memang diarahkan pada kelompok rentan ekonomi yang membutuhkan perlindungan sosial. Selain itu, terdapat pula penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang memperoleh bantuan berupa saldo elektronik untuk membeli kebutuhan pokok di e-warung yang telah ditunjuk. Meskipun sistem ini dinilai lebih transparan, beberapa informan mengaku kesulitan karena tidak semua desa memiliki e-warung yang lengkap, sehingga penerima harus menempuh jarak jauh hanya untuk mencairkan bantuan.

Program BLT yang dialokasikan untuk membantu masyarakat terdampak inflasi dan kenaikan harga

kebutuhan pokok juga belum berjalan optimal [30]. Observasi di salah satu kecamatan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil keluarga yang sudah menerima BLT pada awal tahun 2024. Sebagian lainnya masih menunggu pencairan karena keterlambatan proses administrasi. Namun, bagi yang sudah menerima, bantuan sebesar Rp. 600.000 per bulan sangat membantu meringankan beban pengeluaran, terutama untuk membeli kebutuhan pangan dan biaya sekolah anak.

Program BPNT di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 baru terealisasi sebagian kecil dari anggaran yang dialokasikan. Menurut data dokumentasi, penyerapan baru mencapai sekitar 15% hingga triwulan kedua. Hambatan utama adalah validasi data penerima yang belum selesai, serta keterbatasan infrastruktur digital. Beberapa informan menyatakan bahwa sering terjadi masalah teknis dalam transaksi elektronik di e-warung, seperti mesin EDC yang rusak atau jaringan internet yang tidak stabil.

Hasil wawancara dengan salah satu pendamping PKH menyebutkan bahwa program ini cukup membantu meningkatkan kepatuhan keluarga dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Banyak keluarga penerima yang lebih rutin membawa anak mereka ke posyandu dan memastikan anak tetap bersekolah. Namun, dari sisi administrasi, masih terdapat hambatan berupa keterlambatan transfer dana serta perbedaan nominal bantuan yang diterima antar-KPM. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan di masyarakat, meskipun sebenarnya perbedaan tersebut terkait jumlah komponen yang ditanggung dalam keluarga (misalnya jumlah anak sekolah atau lansia).

Jika dikaitkan dengan teori Stewardship, maka aparat pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar dalam memastikan bansos tepat sasaran. Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme teori dan praktik di lapangan. Keterbatasan SDM, tumpang tindih data, serta kurangnya koordinasi antarinstansi masih menjadi hambatan utama. Di sisi lain, pendekatan New Public Management menuntut adanya ukuran kinerja yang lebih konkret. Dalam hal ini, indikator tidak cukup hanya berupa persentase serapan anggaran, melainkan juga kepuasan penerima manfaat dan penurunan angka kemiskinan.

B. Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan hasil temuan yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengaitkannya dengan teori, konsep, serta penelitian terdahulu yang relevan. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas pengelolaan anggaran program bantuan sosial di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, bagian ini juga akan menyoroti faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang memengaruhi jalannya program, serta memberikan analisis kritis terhadap sejauh mana kebijakan dan pelaksanaannya mampu menjawab permasalahan kemiskinan di masyarakat.

1. Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Efektivitas pengelolaan anggaran dapat diukur melalui ketercapaian target alokasi dana, ketepatan sasaran penerima, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi di lapangan [31]. Ketika realisasi anggaran hanya 0,37%, hal tersebut menandakan masih adanya inefisiensi pada tahap pelaksanaan. Meskipun demikian, pemerintah daerah masih berupaya memperbaiki melalui digitalisasi penyaluran dan verifikasi data.

2. Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan anggaran bansos di Kabupaten Sidoarjo dapat dikelompokkan menjadi:

- Faktor Internal: keterbatasan jumlah pegawai, rendahnya koordinasi antarbidang, serta keterlambatan pencairan dana dari pusat.
- Faktor Eksternal: rendahnya literasi digital masyarakat, perbedaan data antara pusat dan daerah, serta kondisi ekonomi yang dinamis pascapandemi.

3. Dampak Sosial

Meskipun realisasi anggaran rendah, bansos tetap memiliki dampak positif terhadap masyarakat yang benar-benar menerima. Beberapa informan menyebutkan bantuan pangan non tunai membantu meringankan beban pengeluaran bulanan, sementara Program Keluarga Harapan mendorong anak-anak untuk tetap bersekolah dan mengakses layanan kesehatan. Namun, karena distribusi belum merata, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan di tingkat makro masih terbatas.

4. Upaya Perbaikan

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan:

- Peningkatan kapasitas SDM di Dinas Sosial melalui pelatihan manajemen data dan pemanfaatan

aplikasi digital.

- Integrasi data bansos antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih penerima.
- Penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dengan desa/kelurahan sebagai garda terdepan verifikasi data.
- Monitoring dan evaluasi berkala, agar setiap hambatan segera diidentifikasi dan diatasi.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan bansos dipengaruhi oleh kombinasi faktor teknis dan non-teknis. Faktor teknis mencakup keakuratan data, kecepatan distribusi, serta kesiapan infrastruktur digital. Sementara faktor non-teknis meliputi kepercayaan masyarakat, partisipasi warga, dan komitmen moral aparat pemerintah. Kedua aspek ini tidak bisa dipisahkan, karena efektivitas hanya tercapai jika keduanya berjalan selaras.

Secara teoritis, New Public Management menekankan pentingnya efisiensi dan hasil yang terukur. Namun, penerapannya di sektor publik Indonesia seringkali terhambat oleh birokrasi panjang dan regulasi yang kaku. Hal ini menyebabkan adanya paradoks: di satu sisi pemerintah ingin menyalurkan bantuan secara cepat dan tepat, tetapi di sisi lain regulasi yang kompleks justru memperlambat proses. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi salah satu syarat utama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan bansos.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui audit internal yang lebih ketat, penguatan kapasitas SDM, serta peningkatan transparansi publik. Dinas Sosial dapat memanfaatkan forum musyawarah desa sebagai ruang partisipasi warga dalam memverifikasi penerima manfaat. Sementara itu, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur digital hingga ke pelosok desa agar distribusi bansos lebih merata.

Implikasi akademis dari penelitian ini adalah perlunya kajian lanjutan yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur secara statistik seberapa besar efektivitas bansos dalam mengurangi tingkat kemiskinan, sementara pendekatan kualitatif tetap dibutuhkan untuk menggali pengalaman subjektif penerima manfaat. Dengan demikian, kombinasi keduanya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan anggaran bansos.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai efektivitas pengelolaan anggaran program bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Pengelolaan Anggaran Telah Berjalan Sesuai Prosedur.

Pengelolaan anggaran bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan melalui empat tahapan : perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pertanggungjawaban. Secara manajerial, proses ini berjalan sesuai dengan alur dan peraturan yang berlaku, mencerminkan upaya akuntabilitas pemerintah.

2. Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belum Optimal.

Meskipun secara prosedural sudah baik, efektivitas pengelolaan anggaran belum mencapai tingkat optimal. Hal ini dapat diukur dari dua indikator utama: 1) **Ketepatan Sasaran**. Masih ditemukan kasus bantuan sosial yang tidak tepat sasaran akibat ketergantungan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurasinya menjadi kendala utama. 2) **Realisasi Anggaran**. Adanya sisa anggaran yang konsisten setiap tahun menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, yang juga bersumber dari masalah data penerima bantuan sosial yang tidak valid saat proses penyaluran.

3. Akurasi Data Menjadi Faktor Utama.

Faktor paling dominan yang menghambat efektivitas pengelolaan anggaran adalah masalah akurasi data penerima manfaat. Faktor pendukung seperti adanya pendamping sosial dan pemanfaatan teknologi belum mampu mengatasi masalah sistemik ini secara menyeluruh.

VI. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa mendatang:

1. **Bagi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo:**
Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai alur pengajuan bantuan dan mekanisme pelaporan atau pengaduan, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pembaruan data.
2. **Bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo:**
Mendorong dan memfasilitasi integrasi data kependudukan daerah dengan DTKS untuk meminimalisir data ganda atau data penerima yang sudah tidak valid (meninggal dunia / pindah)
3. **Bagi Peneliti Selanjutnya:**
Disarankan penelitian selanjutnya menggunakan penelitian kuantitatif guna mengukur secara statistik seberapa besar tingkat ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran tambahan yang perlu dipertimbangkan:

1. **Pemanfaatan Big Data dan Artificial Intelligence.**
Pemerintah dapat mengintegrasikan data kependudukan dengan data ekonomi rumah tangga melalui big data analytics, sehingga dapat meminimalisir kesalahan sasaran. Teknologi AI dapat digunakan untuk mendeteksi anomali data seperti penerima ganda atau penerima fiktif.
2. **Peningkatan Kapasitas SDM.**
Dinas Sosial perlu memberikan pelatihan rutin bagi pegawai, khususnya terkait manajemen data digital dan pelayanan publik. Dengan SDM yang kompeten, efektivitas pengelolaan anggaran akan lebih meningkat.
3. **Kolaborasi Lintas Sektor.**
Efektivitas pengelolaan bansos tidak bisa hanya ditanggung oleh Dinas Sosial. Perlu adanya kolaborasi dengan perangkat desa, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan sistem pengawasan partisipatif.
4. **Transparansi dan Akuntabilitas Publik.**
Pemerintah daerah dapat memanfaatkan website resmi atau aplikasi mobile untuk menampilkan daftar penerima bansos secara terbuka. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong transparansi anggaran.
5. **Penguatan Infrastruktur Digital.**

Distribusi bansos berbasis aplikasi hanya akan efektif jika seluruh desa memiliki akses internet yang stabil. Oleh karena itu, perlu adanya investasi dalam pembangunan jaringan digital hingga tingkat desa. Melakukan studi komparatif dengan daerah lain yang memiliki model pengelolaan data kemiskinan yang dianggap lebih berhasil untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang bisa diadopsi.

Selain itu, penting pula menyoroti aspek partisipasi masyarakat sebagai elemen kunci dalam efektivitas pengelolaan bantuan sosial. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengawas, pengusul data, dan mitra pemerintah dalam verifikasi. Pengalaman beberapa daerah menunjukkan bahwa ketika warga diberi ruang untuk berpartisipasi aktif, tingkat ketepatan sasaran bansos meningkat signifikan.

REFERENSI

- [1] H. Syamsuri, A. Sumarlin, M. Yusuf, and A. Mujahid, "Economics and Digital Business Review Etos Kerja Dalam Al-Qur'an," vol. 5, no. 1, pp. 284–299, 2024.
- [2] D. V. Ferezegia, "Jurnal Sosial Humaniora Terapan Analisis Tingkat Kemiskinan," *J. Sos. Hum. Terap.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–6, 2018, [Online]. Available: <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1>
- [3] C. W. A. M. MBA, Especialistas en finanzas, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," *Block Caving – A Viable Altern.*, vol. 21, no. 1, pp. 1–9, 2020, [Online]. Available: <https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>
- [4] M. Sabarisman, "ROLE OF SOCIAL ASSOCIATION OF SOCIAL WELFARE IN DISTRICT IN IMPROVING THE WELFARE OF THE FAMILY OF RECEIVING BENEFITS Abstrak PENDAHULUAN Penanggulangan kemiskinan selalu digiatkan oleh berbagai lapisan masyarakat dan pemerintahan dari tahun ke tahun . Sa," *Kesejaht. Sos.*, vol. 5, no. 2, pp. 145–161, 2019.
- [5] K. Fadhli and L. R. Nazila, "Pengaruh Implementasi Bantuan Sosial Bpnt Dan Pkh Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan," *J. Educ. Dev.*, vol. 11, no. 2, pp. 196–202, 2023, doi: 10.37081/ed.v11i2.4654.

- [6] A. R. Garcia, S. B. Filipe, C. Fernandes, C. Estevão, and G. Ramos, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," pp. 1–17.
- [7] J. Wensen, T. O. Rotinsulu, and ..., "... Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Terhadap Tingkat Kesejahteraan ...," *J. ...*, vol. 24, no. 3, pp. 265–283, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jpekd/article/view/45891%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jpekd/article/download/45891/41299>
- [8] T. K. Retnaningsih, H. C. Rahayu, and F. Gitya, "Narrative Literature Review : Penelitian tentang Efektivitas Program Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin," *J. Ilm. Cano Ekon.*, vol. 13, no. 1, pp. 1–7, 2024.
- [9] Diana Febrianti & Diah Utami, "Pemanfaatan Bantuan PKH Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Di Desa Sidorejo Kabupaten Sidorejo," pp. 9–25, 2019.
- [10] D. P. Saputra and A. Widiyarta, "Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo," *JPAP J. Penelit. Adm. Publik*, vol. 7, no. 2, pp. 194–211, 2021, doi: 10.30996/jpap.v7i2.4497.
- [11] N. Zakiyah, L. Oktavia, F. Khairiyah, and M. A. Ilman, "Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro," *Spirit Publik J. Adm. Publik*, vol. 15, no. 2, p. 97, 2020, doi: 10.20961/sp.v15i2.43501.
- [12] L. Ismayanti, "109-141-1-PB.pdf," vol. 4, no. 2, pp. 290–300, 2015.
- [13] R. Indawati, "Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar," *J. Adm. Negara*, vol. 28, no. 1, pp. 24–41, 2022, doi: 10.33509/jan.v28i1.1673.
- [14] F. Alimuddin and H. Damis, "Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang," *Parad. J. Ilmu Ekon.*, vol. 1, no. 1, pp. 108–120, 2018, doi: 10.33096/paradoks.v1i1.89.
- [15] Y. A. P. Nst and Nurlaila, "Efektivitas Pengelolaan Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Kota Kisaran," *SEIKO J. Manag. Bus.*, vol. 6, no. 2, pp. 248–260, 2023.
- [16] A. Y. Ispa, A. Prihatiningsih, and T. Marlina, "Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo," vol. 9, no. 1, pp. 135–148, 2025.
- [17] R. H. Supawanhar, Askani, "Hal. 502," vol. 1, no. 3, pp. 502–510, 2024.
- [18] S. A. S. Risna Resnawaty, "Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial," *Pros. Ks Ris. Pkm*, vol. 4, no. 1, pp. 1–140, 2017.
- [19] P. Julianto, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci," *Qawwam Leader's Writ.*, vol. 1, no. 1, pp. 38–43, 2020, doi: 10.32939/qawwam.v1i1.77.
- [20] J. I. Ekotrans, M. Yendra, W. Putri, and M. Wetsi, "JIEE : Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19," *JIEE J. Ilm. Ekotrans Erud.*, vol. 1, no. 2, pp. 14–22, 2021, [Online]. Available: <https://journal.unespadang.ac.id/JIEE/article/view/78%0Ahttps://journal.unespadang.ac.id/JIEE/article/download/78/77>
- [21] P. Dalam *et al.*, "Efektivitas Program Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Pangan," pp. 137144-10.59188/jurnal
- [22] A. Hakim *et al.*, "Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di kota Tanjungpinang," *PESHUM J. Pendidikan, Sos. dan Hum.*, vol. 4, no. 1, pp. 1033–1042, 2024, [Online]. Available: <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/PESHUM/article/view/6951>
- [23] M. Qamariah, Afifuddin, and Suyeno, "Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi pada Dinas Sosial Kota Batu)," *J. Respon Publik*, vol. 14, no. 4, pp. 1–7, 2020, [Online]. Available: <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/187>
- [24] D. S. Charismana, H. Retnawati, and H. N. S. Dhewantoro, "Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta," *Bhineka Tunggal Ika Kaji. Teor. dan Prakt. Pendidik. Pkn*, vol. 9, no. 2, pp. 99–113, 2022, doi: 10.36706/jbti.v9i2.18333.
- [25] N. Mufida, "Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan," *J. Sos. Sains*, vol. 1, no. 2, pp. 82–92, 2021, doi: 10.59188/jurnalsosains.v1i2.23.
- [26] D. S. Ruhansih, "EFEKTIVITAS STRATEGI BIMBINGAN TEISTIK UNTUK PENGEMBANGAN RELIGIUSITAS REMAJA (Penelitian Kuasi Eksperimen Terhadap Peserta Didik Kelas X SMA Nugraha Bandung Tahun Ajaran 2014/2015)," *QUANTA J. Kaji. Bimbing. dan Konseling dalam*

- Pendidik*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2017, doi: 10.22460/q.v1i1p1-10.497.
- [27] M. L. Prayoga, M. Muchtolifah, and S. Sishadiyati, "Faktor Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo," *Jambura Econ. Educ. J.*, vol. 3, no. 2, pp. 135–142, 2021, doi: 10.37479/jeej.v3i2.11058.
- [28] Sudarta, 濟無No Title No Title No Title, vol. 16, no. 1. 2022.
- [29] A. A. Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," *J. Ilm. Kesehat. Masy. Media Komun. Komunitas Kesehat. Masy.*, vol. 12, no. 3, pp. 145–151, 2020, doi: 10.52022/jikm.v12i3.102.
- [30] S. Maryam and H. R. Cahyani, "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo," *J. Polit. dan Pemerintah. Drh.*, vol. 4, no. 1, pp. 50–72, 2022.
- [31] L. N. Shiyan, K. I. Machekhina, E. A. Tropina, E. N. Gryaznova, and V. V. An, "Effect of humic substances and silicon ions on stability of iron hydroxide (III) nanoparticles," *Adv. Mater. Res.*, vol. 872, pp. 237–240, 2013, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.872.237.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.